

Pelibatan JOTHI dalam Advokasi Internasional ARV dalam Konteks FTA India dan Uni Eropa

Pendahuluan

Keprihatinan serius disuarakan oleh para aktivis, kelompok masyarakat sipil dan para pasien atas perundingan pembentukan perjanjian perdagangan bebas atau sering dikenal sebagai FTA antara Uni Eropa/UE (blok beranggotakan 27 negara) dengan India.

Demikian yang disampaikan oleh Médecins Sans Frontières (MSF atau Dokter tanpa Batas), sebuah organisasi internasional yang pernah meraih Nobel Perdamaian atas kerja-kerja di bidang kemanusiaan di sekitar 80 negara. Dalam surat yang dikirimkan ke Perdana Menteri India, Dr. Manmohan Singh, MSF menuliskan keprihatinannya atas perundingan FTA UE India yang bisa berdampak buruk pada akses atas obat-obatan tidak hanya di India tapi juga di negara-negara berkembang lainnya.

India menurut MSF, telah memainkan peranan penting dalam mensuplai obat-obatan versi generik ke seluruh negara-negara berkembang. MSF misalnya menggunakan 80 persen obat antiretroviral untuk program AIDS/HIV ke seluruh dunia dari India. Ketersediaan kombinasi dosis tetap tiga obat dalam satu tablet telah membawa perubahan luar biasa dalam pengobatan AIDS. Dan itu hanya mungkin terjadi karena tidak ada hak paten diberlakukan untuk membuat tiga obat dalam satu tablet di India. Saat ini, menurut data MSF, 92 persen orang yang hidup dengan HIV/AIDS di negara-negara berkembang dan miskin menggunakan obat antiretroviral yang dibuat di India.

Dalam situasi saat ini, dimana pendanaan untuk perawatan berbagai penyakit seperti AIDS dan penyakit lainnya menurun di berbagai belahan dunia, jutaan orang akan tergantung pada India dalam melanjutkan suplai obat-obat generik, demikian tulis MSF dalam surat yang dikirimkan pada minggu lalu.

[Pada tahun 2005, India telah melakukan harmonisasi peraturan perundangan di bidang HKI – hak kekayaan intelektual, agar sesuai dengan TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights – HKI yang terkait dengan perdagangan). Salah satunya, keharusan melindungi paten atas produk-produk farmasi yang sebelumnya tidak dipatenkan, termasuk mematenkan beberapa obat antiretroviral baru]

MSF mengatakan keprihatinannya bahwa FTA India dengan UE akan mengandung provisi yang membatasi akses atas obat di India dan di semua negara-negara berkembang. Pengaturan-pengaturan tersebut akan memberikan konsekuensi yang drastis atas akses pada obat, provisi tersebut juga akan memperkuat dan memperluas hak-hak monopoli dari pemegang paten yaitu perusahaan-perusahaan multinasional di atas biaya pasien-pasien di India dan negara-negara berkembang. Secara khusus, pengaturan tersebut akan membatasi dan dalam beberapa kasus benar-benar menutup kompetisi dengan obat-obat generik. Obat generik telah terbukti menjadi

kunci dalam menurunkan harga obat dan karena itu memperbaiki akses pada obat.

Dalam suratnya yang ditandatangani oleh Dr. Tido von Schoen-Angerer, Direktur Eksekutif untuk Akses Obat-obatan Esensial, MSF secara khusus meminta Perdana Menteri India untuk memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan perundingan FTA antara India dan Uni Eropa:

- Eksklusivitas data: provisi ini telah didorong oleh UE dalam perundingan-perundingan FTA, dan akan berdampak pada perlambatan bahkan mencegah masuknya obat generik ke pasar, bahkan jika ada aturan mengenai paten. Eksklusivitas data juga bisa menyulitkan efektifitas aturan mengenai lisensi wajib.
- Perpanjangan masa paten: UE sedang mencari cara untuk 'mengkompensasi' lamanya waktu aplikasi di kantor paten dan pengujian obat di pengaturan otoritas obat nasional (misalnya semacam BPOM – Badan Obat dan Makanan), dengan memperpanjang masa paten menjadi lebih dari 20 tahun.
- Penegakan hukum dan aturan perbatasan: aturan perbatasan yang menahan impor atau ekspor barang yang diduga melanggar HKI. Ini akan berdampak besar dalam penyediaan obat-obatan di negara berkembang. Misalnya pada tahun 2008, kapal yang memuat obat-obatan generik dari India, dengan tujuan Afrika dan Amerika Latin, ditahan otoritas pelabuhan UE, atas alasan ada dugaan melanggar HKI. Dan dalam FTA, UE akan mengeksport aturan yang memungkinkan dilakukannya penahanan barang impor atau ekspor oleh bea cukai karena dugaan pelanggaran HKI.

MSF juga mengingatkan bahwa aturan-aturan tersebut di atas tidak diwajibkan dalam TRIPS-WTO, dimana India menjadi anggotanya dan ini ditegaskan dalam Deklarasi Doha untuk Kesehatan Publik tahun 2001. Ini adalah upaya UE untuk melemahkan Deklarasi tersebut dan memastikan standar HKI di UE menjadi standar dunia. Karena itu MSF menyerukan kepada pemerintah India untuk menolak segala bentuk perlindungan HKI yang lebih dari TRIPS.

Pelibatan Jaringan Orang Terinfeksi Dalam Advokasi Terkait FTA India dan Uni Eropa

Sementara itu, Loon Gangte, Presiden dari Delhi Network of Positive People (DNP+), mengatakan perawatan pasien HIV/AIDS yang terus menerus tergantung dari obat-obat antiretrovirus yang baru. Karena perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh pemerintah India (maksudnya WTO), beberapa obat-obatan yang terbaru tersebut telah dipatenkan dan membuat tidak terjangkau. "kami ingin tahu atas nama siapa pemerintah merundingkan" tanya Loon Gangte.

Pelibatan JOTHI sebagai Jaringan Orang Terinfeksi HIV Dalam Advokasi Yang di-inisiasi Jaringan lain dalam kerangka Kerjasama Internasional 2010

Kegiatan advokasi bijak dimulai dengan mendukung petisi penolakan terhadap FTA India dan EU pada April 2010, lebih dari 100 orang anggota JOTHI yang telah dilantik menandatangani petisi tersebut.

Koordinator Nasional JOTHI periode 2008 – 2010, Abdullah Denovan menghubungi Loon Gangte terkait dengan upaya advokasi tersebut. Proses advokasi sempat mengakibatkan ditangkapnya 40 orang aktivis Delhi Network of Positive People (DNP+).

Dengan kerangka advokasi yang sistematis dan juga matang, Abdullah Denovan memimpin 2 pertemuan diplomasi tingkat tinggi dengan Komisi Uni Eropa untuk Brunei Darussalam dan Indonesia. Pertemuan pertama diselenggarakan pada 3/6 dengan First Health Counselor Komisi Uni Eropa yang menghasilkan penjadwalan kembali pembicaraan terkait FTA India dan Uni Eropa serta dampaknya pada obat-obatan esensial dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pertemuan kedua diselenggarakan pada 11/6 yang dihadiri lengkap First Secretary Health dan First Counselor Economic and Trade section. EU menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut bukanlah sebuah hal yang nyata, hal ini dikarenakan perundingan FTA India dan Uni Eropa telah menyepakati fleksibilitas implementasi dari hal – hal yang dikhawatirkan dalam rangka penjaminan akses kesehatan, surat jawaban yang diberikan kepada Tido von Schoen-Angerer MD, Executive Director Campaign for Access to Essential Medicines MSF. Surat tersebut dikirimkan secara langsung kepada Abdullah Denovan oleh First Secretary Economic and Trade EU untuk Indonesia.

Masih dalam kerangka advokasi bijak terkait rencana FTA India EU, Abdullah Denovan Memimpin pertemuan diplomasi dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Biren Nanda pada 13/7 2010 yang menghasilkan klarifikasi mengenai komitmen nyata Pemerintah India untuk tetap melakukan produksi dan distribusi obat generik pada intervensi semua penyakit yang memerlukannya dimanapun. Biren juga menjelaskan bahwa “India sangat sadar dan paham bahwa isu FTA dimaksud bukan saja mengenai permasalahan kesehatan, namun juga HAM, ekonomi, perdagangan dan masih banyak lagi”. JOTHI dan KEDUBES India berkomitmen untuk menggalang sebuah kerjasama dalam bidang kesehatan terkait HIV dan AIDS kedepannya.” Hubungi saya bila ada yang bisa kami bantu lebih jauh lagi”, imbuhnya.

Penjelasan Dari India

“FTA ini adalah langkah terakhir dari upaya panjang selama ini oleh UE dan Amerika Serikat (AS) untuk menutup perusahaan-perusahaan obat generik di India, “ kata Dr. Amit Sen Gupta, dari Jan Swasthya Abhiyan. “sebelumnya melalui WTO mereka telah memaksa India untuk menandatangani TRIPS, dan kemudian melalui FTA, UE memaksa kami untuk melindungi HKI yang standarnya lebih tinggi lagi. India punya hak hukum dan tugas moral untuk mengatakan ‘tidak’.”

Sementara Venkatesh Nayak yang bekerja untuk Kampanye Nasional untuk Hak Masyarakat atas Informasi, mengatakan sebelum perundingan diselesaikan, parlemen harus mengadakan perdebatan dan mengkaji secara kritis mengenai FTA.

Pembicaraan informal dilaporkan akan dilakukan di New Delhi India pada bulan Maret, sebelum pembicaraan formal dilakukan di Brussel Belgia pada April mendatang. Pihak UE mengatakan akan menyelesaikan perundingan FTA dengan India sebelum pertemuan tingkat tinggi India Uni Eropa yang dijadwalkan pada Oktober 2010.